

**ANALISIS POLITISASI ETNISITAS
PADA PEMILIHAN GUBERNUR
PERIODE 2018 - 2023
DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Oktavianus Edwin

NPP. 31.0602

Asdaf Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Program Studi Politik Indonesia Terapan

Email: oktavianusehs137@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Astika Ummy Athahirah, S.STP, M.Si.

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): The author focuses on the problem of using ethnic politicization in the West Kalimantan regional elections for the 2018 – 2024 period. **Purpose:** Obtaining an overview of the analysis of ethnic politicization in the 2018 West Kalimantan Province regional head election. **Method:** This research uses a qualitative descriptive method with an inductive approach. Data collection techniques were carried out using interviews (28 informants) and documentation. **Result:** The results obtained by the author in this research, namely that in the 2018 West Kalimantan governor election, there was ethnic politicization used by candidate pairs and the success team in seeking support from the West Kalimantan community with various political agendas, this was analyzed from various kinds of data obtained by the author. **Conclusion:** There are 4 conclusions in the politicization of ethnicity in the 2018 West Kalimantan regional elections, namely from political issues and interests, political agendas and political participation as well as the formation of ethnic politicization in the 2018 West Kalimantan regional elections.

Keywords: Ethnic Politicization, Regional Elections, Governor Elections

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penulis berfokus pada permasalahan penggunaan politisasi etnis pada pilkada Kalimantan Barat periode 2018 – 2024. **Tujuan:** Memperoleh gambaran analisis politisasi etnis dalam pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara (28 informan), dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini, yaitu dalam pemilihan gubernur kalbar 2018 ada nya politisasi etnis yang digunakan paslon dan tim sukses dalam mencari dukungan masyarakat kalbar dengan berbagai agenda politik, hal ini dianalisis dari berbagai macam data yang telah didapat oleh penulis. **Kesimpulan:** Ada nya 4 kesimpulan dalam politisasi etnis pada pilkada kalbar 2018, yaitu dari isu dan kepentingan politik, agenda politik dan partisipasi politik serta terbentuknya politisasi etnis pada pilkada kalbar 2018. **Kata Kunci :** Politisasi Etnis, Pilkada, Pemilihan Gubernur

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu daerah yang masuk ke dalam daftar daerah rawan saat Pilkada 2018 karena potensi konflik berbau SARA. Pada Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2018 menawarkan kontestasi dengan hasil akhir yang masih samar. Tiga pasangan calon kepala daerah akan bersaing untuk mendapatkan kursi guna memimpin provinsi "seribu sungai" ini. Potret para petarung menggambarkan variasi latar belakang yang bisa menjadi penentu kemenangan. Identitas primordial, seperti etnisitas dan agama, berkelindan dengan ikatan kepartaian serta jabatan di birokrasi (Susanto, 2018). Berdasarkan nomor urut yang sudah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalbar, Milton Crosby dan Boyman Harun ada di nomor urut 1, diikuti pasangan Karolin Margret Natasa dan Suryadman Gidot (nomor urut 2) serta pasangan Sutarmidji dan Ria Norsan (nomor urut 3). Komposisi tiga paslon itu menunjukkan variasi yang bisa mengakomodasi pilihan masyarakat yang lebih mempertimbangkan faktor primordialisme. Komposisi paslon Milton-Boyman menawarkan perpaduan dua kelompok masyarakat yang dominan di Kalbar, yakni etnisitas (Dayak-Melayu) dan agama (Kristen-Islam). Sementara dua paslon lainnya menguatkan satu kelompok identitas tertentu. Karolin- Gidot membawa identitas Dayak dan Katolik/Kristen sementara Midji- Norsan lekat dengan Melayu dan Islam (Andi, 2018) .

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Menurut Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak sekaligus Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Kalimantan Barat, KH Syarif mengingatkan bahaya politik identitas. KH Syarif mengatakan bahwa "Mari kita tolak politik identitas yang sangat berbahaya dan hanya menguntungkan segelintir orang. Mari kita berpihak kepada rakyat supaya mereka tidak terombang-ambing oleh retorika politik sesaat (S. Wahyudi, 2017). Para pakar menjelaskan politik identitas adalah kegiatan politik yang berdasarkan identitas individu baik dari etnis, ras, suku, hingga agama. Dampak dari politik identitas juga cukup serius karena bisa menyerang golongan tertentu yang menimbulkan diskriminasi hingga radikalisme. Dalam penggunaan politisasi etnis dalam berkampanye dapat memicu polarisasi dan konflik antar etnis yang berpotensi merusak hubungan social di Kalimantan Barat atau wilayah tertentu. Hal ini dapat menghambat pembangunan demokrasi pada masyarakat terutama pada saat pilkada di Kalbar (Taufik, 2016).

Dan paslon serta koalisi pendukung melakukan politisasi etnis hanya demi memenangkan calon yang didukung dengan adanya isu yang digunakan menyebabkan adanya masalah intoleransi antar masyarakat. Isu yang banyak disebar di medsos menjadikan dampak negatif bagi bangsa yang menganut keberagaman, sehingga banyak masyarakat yang terpengaruh akan politisasi tersebut dan masyarakat lebih memilih pemimpin berdasarkan etnis yang sama dengan pemilih. Hal ini mayoritas terjadi pada masyarakat tingkat perdesaan atau pun pedalaman di Kalimantan Barat. KPU Kalimantan Barat menetapkan tiga calon yang memenuhi syarat pada 12 Februari 2018. KPU menetapkan nomor urut masing-masing calon setelah melakukan pengundian (Kurniawan, 2018).

Setiap pasangan calon yang sudah dimanipulatifkan kepada masyarakat berdasarkan politik identitas etnis, pada pasangan urut 1 dengan calon gubernur Drs. Milton Crosby, M.Si. dengan etnis Dayak dan calon wakil gubernur H. Boyman Harun, S.H. dengan etnis Melayu dan pasangan urut 2

dengan calon gubernur dr. Karolin Margret Natasa dengan etnis Dayak dan calon wakil gubernur Suryadman Gidot ,M.PD dengan etnis Dayak dan pasangan urut 3 calon gubernur H. Sutarmidji, SH, M.Hum. dengan etnis melayu dan calon wakil gubernur Drs. H. Ria Norsan, M.M., M.H. dengan etnis melayu(Ananta, 2018).

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian Tri Suci Kamalia berjudul Politisasi identitas etnis dalam pilkada (studi tentang politisasi identitas betawi oleh kandidat bertenis betawi dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta Tahun 2012), menemukan Konsep mengenai politisasi identitas di pilkada untuk memfokuskan bahwa arena politisasi identitas adalah pilkada, sedangkan elite yang bermain merupakan kandidat yang maju dalam pilkada. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa pasangan Foke-Nara tidak hanya menggunakan identitas di permukaan saja, seperti pemakaian atribut maupun pelemparan isu identitas. Foke-Nara juga memakai jaringan-jaringan identitas yang mereka miliki untuk menggarap massa Betawi khususnya (Kamila, 2012)

Penelitian Ari Ganjar Herdiansah berjudul Politisasi Identitas Dalam Kompetisi Pemilu Di Indonesia Pasca 2014, menemukan Identitas senantiasanya menjadi komoditas politik yang digulirkan oleh para politikus dalam pertarungan pemilu di Indonesia. Tulisan ini menganalisis bagaimana politisasi identitas menguat pasca pemilu 2014 dan menjelaskan potensi-potensinya terhadap instabilitas politik dan integrasi bangsa. Data-data yang digunakan berasal dari kajian pustaka dan analisis berita-berita terkait dengan pemilu dan identitas, terutama pasca 2014. Tulisan ini mengungkapkan bahwa lemahnya insituisionalisasi partai mendorong para politisi berkolaborasi dengan aktor-aktor civil society untuk mereproduksi isu-isu identitas demi kepentingan pemilu.(Herdiansah, 2014)

Penelitian Tri Okta Putra Laksana 1 berjudul Politisasi isu pribumi pada pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 di media social, penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pada indikator pertama, kubu Ahok mengangkat isu Pilkada damai, Jakarta milik semua, dan keadilan untuk Ahok. Sementara kubu Anies menonjolkan isu pemimpin Muslim santun dan reklamasi pantai. Pada indikator kedua, kubu Ahok dan kubu Anies melakukan kampanye melalui konten yang menarik. Pada indikator ketiga, partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah memberikan respon pada postingan akun medsos berupa like, share, dan komentar. Dari ketiga indikator tersebut, isu/kepentingan merupakan indikator paling dominan yang menyebabkan terjadinya politisasi isu pribumi pada Pilkada Jakarta 2017 di medsos. (Laksana, 2017)

Penelitian Kadek dwita Apriani berjudul Potensi Politisasi Isu-isu identitas Dalam Pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018, menemukan ada nya politisasi identitas oleh tim sukses paslon dalam mendapatkan dukungan masyarakat kalimantan barat dalam pemilihan kepada daerah kalbar.(Apriani, 2018)

Penelitian Rizky Reynaldy berjudul Politisasi identitas dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatra utara tahun 2018. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses politisasi identitas dilakukan oleh kedua Paslon. Namun demikian, politisasi identitas yang dilakukan oleh Djoss tidak seaktif dengan apa yang dilakukan oleh Eramas. Eramas gencar memberikan stimulus kepada masyarakat terkait isu putra daerah dan isu agama, sedangkan politisasi identitas yang dilakukan oleh Djoss lebih kepada pendekatan yang bersifat abstrak, tidak ada keterlibatan mereka

secara langsung dalam setiap kegiatan, melainkan hanya turut menghadiri saja tanpa memprakarsainya.(Reynaldi, 2018)

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana penulis menggunakan teknik analisis oleh Miles dan Huberman. Teknik analisis ini terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Teknik ini untuk mengidentifikasi permasalahan politisasi etnis dalam pilkada kalbar 2018.

1.5. Tujuan.

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan cara, strategi dan upaya mencegah suatu masalah politisasi etnis pada pilkada kedepannya agar menjadi lebih baik dari sebelumnya dengan upaya – upaya dari pemerintah daerah.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan teknik kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, untuk pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, serta untuk teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 28 orang informan yang terdiri dari kasubag politik dalam negeri badan kesatuan bangsa dan politik provinsi Kalimantan barat, tim sukses 3 paslon dan masyarakat Kalimantan barat.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Isu dan Kepentingan Politisasi Etnisitas

Wacana mengenai politik etnis kembali menguat semenjak reformasi di negeri ini digulirkan. Hal ini seiring dengan kebijakan desentralisasi politik yang dijalankan oleh pemerintah. Era reformasi telah menghantarkan bangsa ini ke arah keterbukaan, demokratisasi, otonomi daerah dan desentralisasi ternyata telah melahirkan kembali dan memperkuat kesadaran etnis. Gerakan politik etnisitas ini semakin jelas wujudnya. Bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu ini dalam power-sharing (R. Wahyudi, 2016).

Praktik politik etnis secara nyata menunjukkan bahwa betapa ampuhnya isu ini digunakan oleh aktor politik, ketika berhadapan dengan entitas politik lain. Hal ini terjadi di pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 -2023. Setiap pemilihan kepala daerah di Provinsi Kalimantan Barat, adanya isu mengenai etnisitas, dimana masyarakat harus dipimpin oleh pemimpin yang sama dengan masyarakat itu sendiri, salah satu nya harus memiliki etnis atau suku yang sama dengan masyarakat pemilih. Salah satu faktor terjadinya isu tersebut karena Provinsi Kalimantan Barat memiliki tiga (3) etnis besar, yaitu etnis Dayak, melayu, dan Tionghoa, dimana ada anggapan daerah harus dipimpin oleh putra daerah hal ini mengakibatkan setiap pemilihan kepala daerah kalbar hanya diikuti oleh etnis tersebut. Pada pemilihan kepala daerah di kalbar dimana mayoritas masyarakat memilih kepala daerah berdasarkan etnis yang sama dengan mereka, terutama di daerah kabupaten desa dan pedalaman(Harlan, 2017).

Dalam pilkada kalbar 2018 pada saat itu sedang terjadi nya konflik SARA antara etnis Dayak dan melayu yang dimulai dari pernyataan salah satu tokoh Dayak dan gubernur kalbar pada saat itu. Dan hal ini semakin menambah api konflik antar dua etnis tersebut. Oleh karena itu partai politik dan

paslon atau pun tim sukses memanfaatkan untuk mempolitisasi masyarakat dengan isu etnis agar masyarakat memilih pemimpin dari partai dan kelompok yang mereka dukung dengan dasar etnis yang sama (Agustian, 2015).

Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kasubag politik dalam negeri kesbangpol Kalimantan Barat bahwa “ dalam setiap pemilihan gubernur yang di Kalimantan Barat terjadi politisasi etnis hal ini dilakukan untuk mendapat dukungan masyarakat dari etnis tertentu yang ada di Kalimantan Barat kalbar.” Hal tersebut dikuatkan oleh Tim sukses paslon Sutarmidji-Norsan mengatakan bahwa “ Untuk kampanye membawa isu etnis hanya dilakukan secara organisasi – organisasi terutama pada organisasi melayu di kalbar dan tidak membuat orasi di public” Juga dipertegas oleh Tim sukses paslon Karolin-Gidot bahwa “ Politisasi etnis yang terjadi di Kalimantan Barat merupakan sesuatu kegiatan politik yang hampir setiap pemilihan kepala daerah digunakan, namun pemerintah selalu waspada dan memantau apabila politisasi etnis tersebut digunakan secara berlebihan dan tidak bertanggung jawab sehingga dapat menimbulkan konflik di Kalimantan Barat. “

Mengenai isu politisasi etnis dikemukakan oleh salah satu tokoh masyarakat di kota Pontianak mengatakan bahwa Bagi saya tidak terlalu pengaruh terkait etnis, yang penting rekam jejak prestasi dan gagasan yang dimiliki oleh paslon. Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 dalam hal isu dan kepentingan politik etnis pengaruh nya signifikan dalam peraihan suara paslon dan dilakukan secara terorganisir dengan tidak melakukan orasi publik.

3.2 Agenda Politik

Dalam pelaksanaan politisasi etnis untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih pemimpin dipemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018. Dimana pasangan calon kepala daerah atau pun tim sukses melakukan politisasi etnis melalui beberapa cara, yang pertama dengan cara berkampanye langsung kepada masyarakat dilapangan dengan mempengaruhi atau mempolitisasi agar masyarakat lebih memilih pemimpin berdasarkan etnis yang mereka dukung dan sama dengan mayoritas masyarakat ditempat itu dan cara kedua yaitu dengan melakukan politisasi dimedia social, dimana dengan berkampanye dan mempengaruhi masyarakat dengan isu etnis untuk mendapatkan suara pendukung pada pemilihan kepala daerah dikalbar dianggap lebih efektif pada saat itu, karena lebih muda untuk menyebarkan isu tersebut di masyarakat pada saat itu. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kasubag politik dalam negeri kesbangpol Kalimantan Barat bahwa “Pemerintah berperan aktif memberikan sosialisasi dan seminar politik baik kepada masyarakat dan tingkat sekolah tertama pada tahun politik.” Hal tersebut dikuatkan oleh Tim sukses paslon Sutarmidji-Norsan mengatakan bahwa “Menguatkan opini di organisasi dan basis wilayah mayoritas etnis melayu dikalbar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 dalam agenda politisasi etnis bahwa setiap pihak baik dari pemerintah dan tim sukses paslon memiliki kebijakan dan rencana dalam memenuhi target politik mereka dan strategi yang telah dibuat dari masing – masing instansi pemerintah atau pun partai politik lainnya.

3.3 Partisipasi Politik

Pada pemilihan kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat 2018, dimana masyarakat dipolitisasi atau dipengaruhi baik pasangan calon dan tim sukses dalam mendapatkan dukungan dalam pemilihan kepala daerah. Masyarakat memiliki beragam respon yang berbeda dengan ada nya

politisasi etnis, dimana mayoritas masyarakat daerah kota Pontianak dan sekitarnya lebih sadar akan politik gagasan, sehingga politisasi etnis tidak terlalu mempengaruhi mereka dalam memilih kepala daerah dan untuk masyarakat kabupaten terutama diperdesaan dan pedalaman lebih mudah dan dipengaruhi dengan isu etnis tersebut. Hal ini dikarenakan kurangnya pendidikan politik kepada masyarakat diperdesaan atau pun pedalaman di Provinsi Kalimantan Barat pada pemilihan kepala daerah 2018(Harapan, 2018).

Dalam pilkada kalbar tahun 2018 semua unsur berperan aktif dalam berpartisipasi mensukseskan penyelenggaraan pilkada, baik dari pemerintah dan masyarakat berperan masing – masing sesuai dengan tugas nya seperti Badan Kesbangpol melakukan sosialisasi dan seminar dalam persiapan pemilu kepada masyarakat dan masyarakat melaksanakan pemilihan berdasarkan pilihan mereka dalam pilkada kalbar 2018. Hasil wawancara Untuk dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat setiap tahun nya mengadakan kegiatan pendidikan politik seperti seminar dan pelatihan kepada masyarakat kalbar, terutama pada saat tahun politik. Hal ini dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar lebih dewasa dan bijak dalam mengambil keputusan dan tindakan politik seperti pemilihan kepala daerah.

Mengenai Tim sukses paslon menyatakan mereka tidak terlalu menggunakan politisasi etnis dalam mencari dukungan masyarakat kalbar. Hal ini karena melalui salah satu partai pendukung paslon kepala daerah yaitu Partai PDIP menyatakan bahwa partai mereka memiliki pendukung dari etnis dikalbar seperti etnis dayak,jawa,cina,manado dan etnis timur yang berada di Provinsi Kalimantan Barat dan mayoritas etnis tersebut memilih paslon yang di dukung oleh partai pdip kalbar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh kasubag politik dalam negeri kesbangpol Kalimantan Barat bahwa “Pemerintah berperan aktif memberikan sosialisasi dan seminar politik baik kepada masyarakat dan tingkat sekolah tertama pada tahun politik.” Hal tersebut dikuatkan oleh Tim sukses paslon Sutarmidji-Norsan mengatakan bahwa “Menguatkan opini di organisasi dan basis wilayah mayoritas etnis melayu dikalbar.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 dalam agenda politisasi etnis bahwa setiap pihak baik dari pemerintah dan tim sukses paslon memiliki kebijakan dan rencana dalam memenuhi target politik mereka dan strategi yang telah dibuat dari masing – masing instansi pemerintah atau pun partai politik lainnya.

3.4 Terbentuk nya Politisasi Etnisitas pada Pilkada Kalbar 2018

Politisasi Etnisitas yang dilakukan pasangan calon dan tim sukses dalam pemilihan kepala daerah memiliki beberapa dasar dalam memanfaatkan politisasi etnis untuk mendapatkan dukungan masyarakat kalbar. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh tim sukses Sutarmidji-Norsan bahwa ”Terbentuknya politisasi etnis pada pilkada Kalimantan Barat didasari oleh keberagaman etnis dikalimantan barat terutama pada tiga etnis besar, yaitu dayak, melayu dan tionghua yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sehingga terwujudnya suatu tujuan politik tertentu.”Hal tersebut dikuatkan oleh Tim sukses paslon Karolin-Gigot mengatakan bahwa”Ada nya masyarakat etnis dikalbar yang secara mayoritas dalam memilih pemimpin berdasarkan partai politik pendukung pada pilkada Kalimantan barat.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 bahwa terbentuknya politisasi etnis pada pilkada Kalimantan Barat didasari oleh keberagaman etnis dikalimantan barat terutama pada tiga etnis

besar, yaitu dayak, melayu dan tionghua yang dimanfaatkan untuk kepentingan politik sehingga terwujudnya suatu tujuan politik tertentu.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Politisasi etnisitas pada pemilihan gubernur periode 2018 – 2023 di provinsi Kalimantan barat telah dianalisis oleh peneliti dengan mempertimbangkan berbagai macam data, baik itu data primer berupa wawancara dengan narasumber maupun data sekunder yang ada. Penerapan tersebut dilakukan guna menganalisis dan mengidentifikasi mana saja yang merupakan faktor-faktor yang mendukung penelitian tersebut.

Dalam penelitian ini peneliti menemukan ada nya politisasi etnis dalam mendapatkan dukungan masyarakat dalam memilih gubernur, hal ini dilakukan baik dari paslon maupun tim sukses paslon. Pada pilkada kalbar 2018 terdapat 3 paslon dengan latar belakang etnis yang berbeda, hal ini digunakan untuk politisasi etnis dikalbar.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, persamaan dengan penelitian yang diteliti oleh penulis yaitu sama-sama menggunakan metode penelitan kualitatif dan mengkaji tentang pemilihan kepala daerah. Meskipun demikian masih terdapat perbedaan mengenai konsep yang penulis gunakan dalam penelitian ini dibanding dengan penelitian terdahulu di atas, yaitu penulis lebih memfokuskan pada politisasi etnis dalam mendapatkan dukungan masyarakat Kalimantan barat pada pilkada kalbar 2018.

3.6. Diskusi Temuan Menarik lainnya

Penulis menemukan bahwa faktor pendukung utama dalam suksesnya pilkada kalbar 2018, yaitu persiapan yang baik dilakukan oleh badan kesatuan bangsa dan politik dan komisi pemilihan umum provinsi Kalimantan barat 2018. Dimana sosialisasi yang konsisten dilakukan pada masyarakat dalam rangka pilkada kalbar.

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa politisasi etnis pada pemilihan gubernur provinsi Kalimantan barat periode 2018 – 2023 merupakan suatu cara untuk mendapatkan dukungan masyarakat Kalimantan barat dengan memanfaatkan etnis yang di politisasi oleh paslon maupun tim sukses paslo.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 dalam hal isu dan kepentingan politik etnis pengaruh nya signifikan dalam peraihan suara paslon dan dilakukan secara terorganisir dengan tidak melakukan orasi publik. Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 dalam agenda politisasi etnis bahwa setiap pihak baik dari pemerintah dan tim sukses paslon memiliki kebijakan dan rencana dalam memenuhi target politik mereka dan strategi yang telah dibuat dari masing – masing instansi pemerintah atau pun partai politik lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pemilihan gubernur di Kalimantan Barat periode 2018 sampai 2023 dalam agenda politisasi etnis bahwa setiap pihak baik dari pemerintah dan tim sukses paslon memiliki kebijakan dan rencana dalam memenuhi target politik mereka dan strategi yang telah dibuat dari masing – masing instansi pemerintah atau pun partai politik lainnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada dual wilayah saja sebagai model studi kasus yang dipilih, yaitu kota Pontianak dan kabupaten kuburaya.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan persiapan yang lebih baik sehingga dapat menemukan solusi yang lebih tepat untuk kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Kalimantan Barat beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Agustian, R. (2015). *isu sgra di kalbar*. <https://www.rri.co.id/pontianak/pemilu/398009/kalbar-rawan-isu-sara-pengamat-harus-diantisipasi>
- Ananta, B. (2018). *etniscalon gubernur kalar 2018*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pemilihan_umum_Gubernur_Kalimantan_Barat_2018
- Andi, A. (2018). *tiga calon gubernur kalbar 2018*. <https://regional.kompas.com/read/2018/02/12/16004731/tiga-pasang-calon-siap-bertarung-di-pilkada-kalbar>
- Apriani, kadek dwita. (2018). *politisasi isu ientitas kalbar*. <https://rri.co.id/pemilu/398009/kalbar-rawan-isu-sara-pengamat-harus-diantisipasi>
- Harapan, B. (2018). *pemilihan gubernur kalbar 2018*. <https://kalimantan.bisnis.com/read/20180617/407/806961/pilgub-kalbar-2018-milenial-pilih-karolin-gidot>
- Harlan, D. (2017). *etnis kalbar*. <https://kalbar.bpk.go.id/pemerintah-daerah-provinsi-kalimantan-barat-1/#:~:text=Suku bangsa dominan besar yaitu,melebihi 90%25 penduduk Kalimantan Barat.>
- Herdiansah, ari ganjar. (2014). *politisasi identitas pasca pemilu 2014*. https://scholar.google.co.th/citations?view_op=view_citation&hl=th&user=mVaLzacAAAAJ&citation_for_view=mVaLzacAAAAJ:roLk4NBRz8UC
- Kamila, tri suci. (2012). *politisasi identitas etnis betawi di dki*. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/24122>
- Kurniawan, R. (2018). *hasil kpu pilkada kalbar*. <https://regional.kompas.com/read/2018/07/08/22505561/rekapitulasi-kpu-sutarmidji-riar-norsan-unggul-di-pilkada-kalbar>
- Laksana, tri okta putra. (2017). *politisasi isu pribumi dki*. <https://jurnal.unitri.ac.id/index.php/reformasi/article/view/1870>
- Reynaldi, R. (2018). *politisasi sumatra utara 2018*. <https://journal.bawaslu.go.id/index.php/JAP/article/view/2>
- Susanto, B. (2018). *pemilihan gubenur kalbar 2018*. <https://nasional.kompas.com/read/2018/07/13/15535341/infografik-peta-kemenangan-pilkada-kalimantan-barat-2018>
- Taufik, M. (2016). *dampak politik identitas*. <https://mamujutengah.bawaslu.go.id/bahaya-politik-identitas-bagi-keberagaman/>
- Wahyudi, R. (2016). *kebebasan politik*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Kebebasan_politik#:~:text=Kebebasan politik adalah

salah satu, undang dan peraturan negara lainnya.

Wahyudi, S. (2017). *pilkada kalbar iu sara menurut rektor iain*. <https://iainptk.ac.id/rektor-iain-pontianak-membuka-sarasehan-kebangsaan-alumni-kpi/>

